

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana Program (S1)
pada program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

VIKI INDRASARI

NIM. C2B007063

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Viki Indrasari

Nomor Induk Mahasiswa : C2B007063

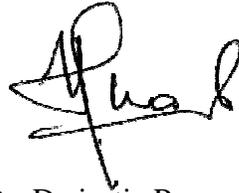
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ IESP

Judul/ Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN
EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH**

Dosen Pembimbing : Dr. Dwisetia Poerwono, MSc.

Semarang, 7 Desember 2011

Dosen Pembimbing,



(Dr. Dwisetia Poerwono, MSc.)

NIP. 195512081980031003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Viki Indrasari

Nomor Induk Mahasiswa : C2B007063

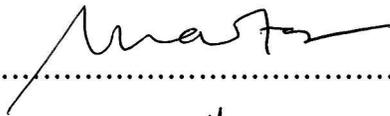
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN
EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Desember 2011

Tim Penguji :

1. Dr. Dwisetia Poerwono, MSc. (.....)

2. Maruto Umar Basuki, SE, MSi. (.....)

3. Evi Yulia P, SE, MSi. (.....)

Mengetahui, 5 Januari 2011
Pembantu Dekan I



(Anis Chariri, SE, MCom, Ph.D. Akt.)
NIP 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Viki Indrasari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul :Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin/ meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 7 Desember 2011

Yang membuat pernyataan,



(Viki Indrasari)

NIM: C2B007063

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.”

“Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama.”

Sumber :

<http://ancreative.blogspot.com/2009/05/kumpulan-moto.html>

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta
- Kedua adikku tersayang
- Sahabat-sahabatku

ABSTRACT

Until right now, Central Java still be faced to problem in enhance of economic growth. Economic growth of Central Java in last six periods showed that static but lower better than other provinces in Java Island and Indonesia. Besides that, value of final goods and services or Gross Regional Domestic Product (GRDP) were lower better than other provinces in Java Island. Therefore, it need to analysis the factors who support economic growth in this region and how much effect this variable to economic growth in Central Java.

This study used secondary data analysis with panel data, which consist of time series data for periods of 2004-2009 and cross section data of regency/ municipality in Central Java. The approaches used to estimate the regression model in this study is Fixed Effect Model (FEM), or Least Square Dummy Variable (LSDV) because this approaches used dummy variable in regression model to explained the different characteristic and resources of each region.

The regression result showed that capital expenditure variable has a positive and significant impact on economic growth. Beside that, indicator of fiscal decentralization has't effect on economic growth. And then labor force and education have a positive and significant impact on economic growth.

Keywords: *economic growth, capital expenditure, fiscal decentralization, labor force, education, Fixed Effect Model (FEM)*

ABSTRAK

Hingga saat ini, Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada permasalahan dalam mempertinggi pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dalam enam tahun terakhir walaupun stabil, namun bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah. Selain itu, nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan yang dicerminkan oleh nilai PDRBnya juga lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yang terdiri atas data *time series* selama periode 2004-2009 dan data *cross section* 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM) atau disebut juga dengan *Least Square Dummy Variable* (LSDV) karena pendekatan ini memasukkan variabel dummy ke dalam persamaan regresi. Variabel dummy yang digunakan dalam model persamaan regresi ini bertujuan menjelaskan perbedaan karakteristik dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing daerah.

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian diperoleh hasil juga bahwa angkatan kerja dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, belanja modal, desentralisasi fiskal, angkatan kerja, pendidikan, *Fixed Effect Model* (FEM)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Penulisan menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan namun berkat doa, dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Akt.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Dr. Dwisetia Poerwono, MSc. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, motivasi dan saran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, Msi. selaku dosen wali yang banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi UNDIP, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Seluruh petugas Badan Pusat Statistik Semarang, Jawa Tengah yang telah membantu terselesainya skripsi ini dengan menyediakan data-data yang penulis butuhkan.
6. Kedua orang tuaku tercinta, atas dukungan, yang telah mereka berikan baik secara moral maupun materi. Terima kasih atas semua dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan. Penulis sangat bangga karena terlahir sebagai bagian dari keluarga kalian.
7. Kedua adikku tersayang, atas semangat yang kalian berikan dan semua hal yang telah kita lewati bersama.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku tercinta, Dina Agustina, Dini Ayu, Ranika Tiwi, Purnalita Diaz, Putri Fajriani, Rifda Zahra, dan Annisa Purbosari. Semoga persahabatan kita tidak akan pernah putus selamanya.
9. Terima kasih pula penulis ucapkan pada semua teman-teman seperjuangan, baik teman IESP, SMA dan sebagainya atas semua yang telah kita lalui bersama.
10. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, Oleh karena itu, penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, 7 Desember 2011

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'V' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

Viki Indrasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1.4 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Landasan Teori.....	19
2.1.1 Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi.....	19

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Klasik.....	21
2.1.2.2 Teori Harrod-Domar.....	27
2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Neoklasik.....	28
2.1.2.4 Teori Pertumbuhan Endogen.....	29
2.1.3 Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.....	30
2.1.3.1 Belanja Modal.....	30
2.1.3.2 Hubungan antara Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.....	31
2.1.5 Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi.....	34
2.1.5.1 Angkatan Kerja.....	34
2.1.5.2 Hubungan antara Angkatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi.....	35
2.1.6 Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	36
2.1.6.1 Pendidikan.....	36
2.1.6.2 Hubungan antara Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	37
2.1.4 Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi.....	41
2.1.4.1 Desentralisasi Fiskal.....	41
2.1.4.2 Hubungan antara Indikator Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi.....	45
2.2 Penelitian Terdahulu.....	47

2.3 Kerangka Pemikiran.....	62
2.4 Hipotesis.....	64
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	65
3.1.1 Variabel Penelitian.....	65
3.1.2 Definisi Operasional Variabel.....	65
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	68
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	69
3.4 Metode Analisis.....	70
3.4.1 Estimasi Model Regresi.....	70
3.4.2 Estimasi Model Regresi dengan Data Panel.....	72
3.4.3 Asumsi Model Regresi Linier Klasik.....	77
3.4.4 Uji Statistik.....	81
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	86
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	86
4.1.1 Keadaan Geografis.....	86
4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	87
4.1.3 Belanja Modal.....	91
4.1.4 Angkatan Kerja.....	94
4.1.5 Pendidikan.....	97
4.1.6 Desentralisasi Fiskal.....	99

4.2 Analisis Data.....	104
4.2.1 Asumsi Regresi Model Linier Klasik.....	106
4.2.2 Uji Statistik.....	111
4.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	115
4.3.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	117
4.3.3 Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	118
4.3.4 Pengaruh Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	119
4.3.2 Pengaruh Indikator Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	120
4.3.5 Pengaruh Dummy Kabupaten/ Kota terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	121
BAB V PENUTUP.....	123
5.1 Simpulan	123
5.2 Keterbatasan.....	124
5.3 Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN.....	132

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2004-2009 (%).....	4
Tabel 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada Provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2004-2009 (Miliar Rupiah).....	5
Tabel 1.3 Perkembangan Belanja Modal pada Provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2004-2009 (Miliar Rupiah).....	7
Tabel 1.4 Perkembangan Angkatan Kerja yang Bekerja pada Provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2004-2009 (Ribu Orang).....	9
Tabel 1.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas dengan Pendidikan Minimal SMA di Pulau Jawa Tahun 2004-2009 (Ribu Orang).....	10
Tabel 1.6 Komposisi Penerimaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009 (Ribu Rupiah).....	13
Tabel 1.7 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi-provinsi di Pulau Jawa Tahun 2004-2009 (Miliar Rupiah).....	14
Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu.....	57
Tabel 4.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Miliar Rupiah).....	88

Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009 (%).....	90
Tabel 4.3 Perkembangan Realisasi Belanja Modal (Miliar Rupiah) dan Rata-rata Pertumbuhan (%) pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009.....	93
Tabel 4.4 Perkembangan (Ribu Orang) dan Rata-rata Pertumbuhan (%) Angkatan Kerja yang Bekerja pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009.....	95
Tabel 4.5 Proporsi Penduduk (%) dengan Pendidikan Minimal SMA Terhadap Jumlah Penduduk pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009.....	98
Tabel 4.6 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah) dan Kontribusinya terhadap Total Penerimaan Daerah (%) pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009.....	101
Tabel 4.7 Hasil Regresi Utama.....	105
Tabel 4.8 R ² Hasil Regresi Pengaruh Belanja Modal, Angkatan Kerja, Pendidikan dan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009.....	107
Tabel 4.9 Heteroskedasticity Test : White.....	108
Tabel 4.10 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.....	109
Tabel 4.11 Hasil Regresi dan Keputusan dari Hipotesis Atas Pengaruh Belanja Modal, Angkatan Kerja, Pendidikan dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	112

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	63
Gambar 4.1 Deteksi Normalitas.....	110

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data.....	132
Lampiran B Hasil Regresi Parsial.....	139
Lampiran C Hasil Deteksi Heteroskedastisitas.....	142
Lampiran D Hasil Deteksi Autokorelasi.....	145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Pembangunan ekonomi tersebut mencakup berbagai aspek-aspek pembentuk seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran serta baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tercapainya tujuan nasional. Menurut Arsyad (1999), pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Sebagaimana tujuan dari pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) riil.

Diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional dan pemberlakuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah yang berperan penting dalam menyukseskan perekonomian daerahnya melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan nasional, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasionalnya terutama dalam era otonomi luas sekarang ini.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga berperan penting terhadap sukses tidaknya pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Masing-masing provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah harus mampu menghadapi tantangan perekonomian global yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi terutama dalam era reformasi dimana masing-masing daerah memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk mengelola kekayaan daerah yang dimiliki dan memanfaatkannya untuk kegiatan pembangunan di daerah tersebut.

Hingga saat ini Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada permasalahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi tersebut dalam kondisi stabil, namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Jawa maupun Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah. Tabel 1.1 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2004-2009.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi-provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2004-2009 (%)

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi						Rata-rata
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	DKI Jakarta	5,65	6,01	5,95	6,44	6,23	5,02	5,88
2	Jawa Barat	4,77	5,60	6,02	6,48	6,21	4,19	5,54
3	Jawa Tengah	5,13	5,35	5,33	5,59	5,61	5,14	5,34
4	DIY	5,12	4,73	3,70	4,31	5,03	4,43	4,55
5	Jawa Timur	5,83	5,84	5,80	6,11	6,16	5,01	5,79
6	Banten	5,63	5,88	5,57	6,04	5,77	4,69	5,60
	Indonesia	5,03	5,69	5,50	6,35	6,01	4,58	5,53

Sumber : BPS, Statistik Indonesia berbagai terbitan

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dalam enam tahun terakhir tumbuh 5,34 % per tahun. Walaupun pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tampak stabil dari tahun ke tahun namun apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa masih tergolong rendah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Provinsi DKI Jakarta masih menempati posisinya sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa yang kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (5,79%), Provinsi Banten (5,60%), Provinsi Jawa Barat (5,54%), Provinsi Jawa Tengah (5,34%) dan Provinsi DIY (4,55%).

Permasalahan lain yang dihadapi Provinsi Jawa Tengah tidak hanya terletak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, namun juga masih rendahnya nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan.

Hal ini tercermin pada nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 di Provinsi Jawa Tengah dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa tahun 2004-2009.

Tabel 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2004-2009 (Miliar Rupiah)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009
DKI Jakarta	277.537,3	294.354,6	311.893,7	332.033,9	352.753,7	370.499,7
Jawa Barat	220.295,7	234.062,3	248.774,4	265.834,0	281.719,5	293.548,7
Jawa Tengah	127.212,0	133.578,0	140.681,4	149.083,1	157.023,6	165.180,0
DI Yogyakarta	16.146,4	16.910,9	17.535,7	18.291,5	19.208,9	20.051,5
Jawa Timur	241.628,1	255.745,0	270.564,9	286.912,1	303.838,2	318.854,3
Banten	54.880,4	58.106,9	61.341,7	65.046,8	68.802,9	72.031,1
Indonesia	1.506.296,6	1.605.247,6	1.703.422,4	1.821.757,7	1.939.483,0	2.035.125,1

Sumber : BPS, Statistik Indonesia

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai PDRB (Produk Regional Domestik Bruto) Provinsi Jawa Tengah bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa masih rendah. Apabila diperingkat berdasarkan nilai PDRBnya, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat 4 dari enam provinsi di Pulau Jawa. Sedangkan provinsi dengan nilai PDRB tertinggi masih ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta.

Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut dalam menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi tersebut akan dijadikan sebagai salah

satu masukan bagi Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa tiga faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain akumulasi modal, pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja dan kemajuan teknologi.

Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung/ diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Akumulasi modal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga oleh pihak swasta. Peran akumulasi modal baik oleh pemerintah maupun swasta merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Akumulasi modal atau biasa disebut dengan istilah investasi ini memainkan peranan penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal dapat memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional, maupun menciptakan lapangan kerja baru yang nantinya akan semakin memperluas kesempatan kerja (Todaro dan Smith, 2006).

Dalam upaya menunjang minat investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya ke suatu daerah terutama, pada tingkat kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah maka pemerintah daerah setempat perlu untuk memperbaiki infrastruktur-infrastruktur publik melalui peningkatan belanja daerah terutama alokasi belanja modal. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dikaji secara empiris misalnya oleh Sodik (2007) dan Indrawati (2007). Kesimpulan yang diperoleh kedua peneliti tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran

pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan dari kerangka teoritis, teori pertumbuhan endogen memberikan gambaran mengenai peran pemerintah dalam proses pembangunan berupa investasi pada sektor publik dan sumber daya manusia. Tabel 1.3 menggambarkan perkembangan belanja modal Provinsi Jawa Tengah dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa tahun 2004-2009.

Tabel 1.3
Perkembangan Belanja Modal pada Provinsi-provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2004-2009 (Miliar Rupiah)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
DKI Jakarta	2.187,61	2.757,51	5.432,05	5.190,90	2.581,60	5.944,87	4.015,76
Jawa Barat	277,49	335,10	630,63	360,69	354,31	923,77	480,33
Jawa Tengah	183,22	215,88	635,30	373,24	530,11	588,25	421,00
DI Yogyakarta	82,76	107,68	94,75	104,22	191,83	206,07	131,22
Jawa Timur	364,41	386,83	801,85	642,10	548,51	441,71	530,90
Banten	123,03	208,51	465,05	444,89	593,95	659,81	415,87

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi

Tabel 1.3 menunjukkan besarnya belanja modal masing-masing provinsi di Pulau Jawa tahun 2004-2009. Belanja modal yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kelima sedangkan Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan belanja modal terbesar di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Secara umum, perkembangan belanja modal di Provinsi Jawa Tengah dalam enam tahun terakhir cenderung berfluktuatif.

Modal pembangunan lain yang penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi menurut Todaro dan Smith (2006) adalah sumber daya manusia yang dimiliki.

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi ini. Semakin besar tenaga kerja produktif di suatu daerah maka output yang dihasilkan juga semakin besar. Tenaga kerja produktif ini terbentuk dari pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi namun demikian pertumbuhan penduduk yang tinggi juga dilematis. Hal ini terjadi karena dengan tumbuhnya jumlah penduduk dalam skala besar di satu sisi merupakan suatu keuntungan berupa pasar domestik yang semakin besar namun di sisi lain beban pemerintah semakin besar dan rawan terhadap timbulnya permasalahan pembangunan yang baru.

Menurut BPS, penduduk usia kerja/ tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja (*labor force*) terdiri atas (1) golongan yang bekerja, dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Tabel 1.4 menunjukkan perkembangan angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa tahun 2004-2009.

Tabel 1.4
Perkembangan Angkatan Kerja yang Bekerja pada Provinsi-provinsi
di Pulau Jawa Tahun 2004-2009 (Ribu Orang)

Propinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009
DKI Jakarta	4.100,1	4.181,2	4.303,4	4.395,3	4.772,5	4.687,7
Jawa Barat	16.938,6	17.157,1	17.559,1	18.240,0	18.743,9	18.981,3
Jawa Tengah	16.827,3	16.995,0	16.924,2	17.664,3	16.690,9	17.087,6
DI Yogyakarta	1.815,4	1.851,2	1.868,5	1.889,4	1.999,7	2.016,7
Jawa Timur	18.822,2	19.298,2	19.244,9	20.117,9	20.178,6	20.338,6
Banten	3.839,4	3.864,8	3.990,4	4.016,4	4.325,5	4.357,2

Sumber : BPS, Statistik Indonesia

Tabel 1.4 menunjukkan perkembangan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa dimana Provinsi Jawa Tengah memiliki angkatan kerja terbesar ketiga. Secara umum, perkembangan jumlah angkatan kerja Provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2004-2005, jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari 16.827,3 ribu orang tahun 2004 menjadi 16.995 ribu orang pada tahun 2005 atau mengalami peningkatan sebesar 1 % per tahun. Pada tahun 2006, jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 0.4%. Pada tahun 2007, jumlah angkatan kerja meningkat kembali menjadi 17.664,3 ribu orang atau tumbuh sebesar 4,37%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2008 dan 2009 dimana pada tahun 2008 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun berikutnya.

Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa berdasarkan sifatnya investasi dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu bentuk dari investasi tidak langsung. Investasi dalam sumber daya manusia memiliki keuntungan diantaranya dapat memperbaiki kualitas pekerja

dan memiliki pengaruh yang sama bahkan lebih kuat terhadap produksi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pendidikan merupakan salah satu bentuk dari investasi modal manusia yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh yang siap bersaing di era globalisasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budiono (2009) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah melalui jumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan dasarnya. Tabel 1.5 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan minimal SMA di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa pada tahun 2004-2009.

Tabel 1.5
Perkembangan Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas dengan Pendidikan Minimal SMA di Pulau Jawa Tahun 2004-2009 (Ribuan Orang)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009
DKI Jakarta	2.381,3	2.460,4	2.685,2	2.392,5	2.677,3	2.791,8
Jawa Barat	4.008,6	4.474,6	2.685,2	4.820,1	5.398,2	5.785,6
Jawa Tengah	3.281,7	3.824,2	3.770,0	3.645,8	3.854,0	4.115,2
DI Yogyakarta	611,6	678,2	786,5	701,9	804,8	875,4
Jawa Timur	4.298,1	4.490,9	4.878,7	4.543,5	4.963,0	5.382,5
Banten	1.335,3	1.213,1	1.379,7	1.233,2	1.470,1	1.570,4

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia berbagai tahun terbitan

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa dalam enam tahun terakhir jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah yang telah menamatkan pendidikan minimal SMA terus mengalami peningkatan atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,63 % per tahun. Sedangkan bila dengan provinsi lain di Pulau Jawa, jumlah penduduk usia

kerja di Provinsi Jawa Tengah dengan pendidikan minimal SMA menempati urutan ketiga.

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah didasarkan pada Undang-undang No. 33 Tahun 2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional dan demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut undang-undang tersebut antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan bentuk transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Penelitian mengenai pengaruh kemampuan finansial terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh Pujiati (2007). Berdasarkan studinya, diperoleh kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan asli daerah yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas positif sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, peran pendapatan asli daerah harus dioptimalkan agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat, yaitu berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi pendapatan asli daerah yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian daerah dalam pembangunan daerahnya, sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat.

Adapun perkembangan penerimaan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam enam tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6
Komposisi Penerimaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009
(Ribu Rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Pembiayaan	Total Penerimaan
2004	1.865.390.530	789.076.690	229.132.000	383.353.110	3.266.952.330
2005	2.490.643.742	807.132.660	229.063.000	542.577.294	4.069.416.696
2006	2.630.621.270	1.185.860.720	1.985.970	814.829.550	4.633.297.510
2007	2.932.805.173	1.419.342.557	1.1364.864	431.233.897	4.794.746.491
2008	3.698.843.478	1.504.184.018	387.113	848.298.788	6.051.713.397
2009	3.658.340.173	1.682.052.878	0	694.157.160	6.034.550.211

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa baik pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dalam enam tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Diantara kedua sumber penerimaan tersebut, pendapatan asli daerah memiliki kontribusi terbesar dalam menyumbang penerimaan daerah sebesar 57 % pada tahun 2004 dan 60% pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa penggalian dana oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui sumber daya asli daerah dapat termanfaatkan dengan maksimal. Meningkatnya pendapatan asli daerah dan turunnya proporsi tingkat subsidi diharapkan dapat menjadi sinyal bagi kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sekarang ini. Adapun perbandingan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa pada tahun 2004-2009 dapat dilihat pada tabel 1.7. Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah masih rendah apabila dibandingkan

dengan provinsi-provinsi besar lainnya di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Tabel 1.7
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi-provinsi
di Pulau Jawa Tahun 2004-2009 (Miliar Rupiah)

Propinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009
DKI Jakarta	6.430,33	7.597,87	7.817,46	8.731,09	10.455,57	11.134,55
Jawa Barat	2.846,80	3.604,77	3.748,40	4.221,67	5.275,05	5.179,14
Jawa Tengah	1.865,39	2.490,64	2.630,62	2.930,81	3.698,84	3.658,34
DI Yogyakarta	347,40	401,91	436,48	488,89	632,87	596,85
Jawa Timur	2.860,56	3.464,58	3.703,28	4.164,25	5.212,32	3.886,99
Banten	818,25	1.070,24	1.118,02	1.298,46	1.661,17	1.526,46

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah Provinsi

1.2 Rumusan Masalah

Hingga saat ini, provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada permasalahan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dalam enam tahun terakhir walaupun stabil, namun bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah. Selain itu, nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan yang dicerminkan oleh nilai PDRBnya juga lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga faktor utama antara lain akumulasi modal dalam bentuk investasi, partisipasi tenaga kerja lokal dan kemajuan teknologi. Ketiga faktor tersebut diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Akumulasi modal dalam bentuk investasi diyakini sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Masih rendahnya minat swasta dalam menanamkan modalnya terutama pada sebagian besar kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah mengharuskan pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan pengeluaran daerahnya terutama dalam penyediaan infrastruktur-infratraktur publik. Dalam APBD, besarnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam penyediaan infrastruktur publik tercermin pada besarnya belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selain akumulasi modal atau investasi, faktor utama yang juga turut berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja produktif di suatu daerah sehingga dapat meningkatkan jumlah output yang dihasilkan daerah tersebut. Dengan meningkatnya jumlah output yang dihasilkan maka akan membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tenaga kerja yang produktif terbentuk dari pertumbuhan penduduk yang tinggi namun demikian pertumbuhan penduduk yang tinggi juga dilematis. Hal ini terjadi karena dengan tumbuhnya jumlah penduduk dalam skala besar di satu sisi

merupakan suatu keuntungan berupa pasar domestik yang semakin besar dan rawan terhadap timbulnya permasalahan pembangunan yang baru.

Pembangunan manusia merupakan bentuk dari investasi tidak langsung yang turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk dari investasi modal manusia. Dengan membaiknya kualitas modal manusia di suatu daerah maka akan dapat memperbaiki kualitas pekerja dan memiliki pengaruh yang sama bahkan lebih kuat terhadap produksi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Selain faktor-faktor di atas, dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia maka hal tersebut akan berpengaruh pula terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Peranan pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah merupakan salah satu indikator yang sering digunakan. Berdasarkan permasalahan di atas maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “seberapa besar pengaruh belanja modal, angkatan kerja, pendidikan dan indikator desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal, angkatan kerja, pendidikan dan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Tambahan informasi dan bahan kajian tentang besarnya pengaruh belanja modal, angkatan kerja, pendidikan dan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
2. Masukan pemerintah daerah setempat untuk program pembangunan selanjutnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

2.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kegunaan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Selain itu, dalam bab ini juga dikemukakan kerangka pemikiran dan hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisa kuantitatif dan/ atau kuantitatif, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Bab ini meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri atas simpulan, keterbatasan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Pembangunan ekonomi tersebut mencakup berbagai aspek-aspek pembentuk seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran serta baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Pengertian lain dari pembangunan ekonomi menurut Sukirno (2006) adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat sehingga taraf kehidupan masyarakat semakin membaik.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah baik nasional maupun daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah.

Sebagai salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan PDB/ PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Menurut Todaro dan Smith (2006), sumber pertumbuhan ekonomi dapat meliputi berbagai faktor baik ekonomi maupun non ekonomi, namun sumber-sumber utama pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya fisik, yang selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kuznets mengenai sejarah pertumbuhan pendapatan nasional negara-negara maju, telah memberikan definisi pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya

kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada (Kuncoro, 2006).

Selain memberikan definisi pertumbuhan ekonomi, dalam studinya juga dijabarkan enam karakteristik proses pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara yang sekarang maju meliputi tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi; tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi; tingkat transformasi struktural yang tinggi; tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi; adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru serta terbatasnya penyerapan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia (Kuncoro, 2006).

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Klasik

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, Kaum Klasik mengemukakan teori mengenai pertumbuhan ekonomi sebelum tahun 1870. Kaum Klasik mengemukakan bahwa peranan modal sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Penggunaan modal tersebut ditekankan untuk meningkatkan penawaran setinggi-tingginya yang kemudian akan diikuti pula oleh permintaan yang tinggi pula (*supply creates its own demand*). Namun dalam kenyataannya, penawaran yang tinggi tersebut tidak diikuti dengan permintaan yang tinggi pula sehingga menimbulkan permasalahan seperti

over produksi, pengangguran dan deflasi. Teori pertumbuhan Klasik ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus dan John Stuart Mill. Secara umum asumsi yang digunakan Kaum Klasik mengenai teori pertumbuhan ekonomi antara lain perekonomian dalam keadaan full employment, perekonomian terdiri atas dua sektor yaitu konsumen dan produsen, tidak ada campur tangan pemerintah dan pembangunan ekonomi tergantung pada mekanisme pasar (Amalia, 2007).

a. Pandangan Adam Smith

Adam Smith merupakan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan kebijaksanaan *laissez-faire*, dan merupakan ahli ekonomi yang banyak berfokus pada permasalahan pembangunan. Hal ini dapat dilihat di dalam bukunya yang berjudul “*An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations*” pada tahun 1776 yang mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi secara sistematis. Inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith dibagi ke dalam dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 1999).

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara yang menentukan output total yang dihasilkan menurut Smith adalah sumber daya alam yang tersedia atau tanah, sumber daya manusia, dan stok barang modal yang ada. Menurut Smith, sumber daya alam merupakan unsur pokok dalam kegiatan produksi suatu masyarakat. Sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Jika sumber daya alam belum sepenuhnya digunakan, maka jumlah penduduk dan stok modal akan memegang peranan penting dalam pertumbuhan

output. Sedangkan saat sumber daya alam yang tersedia tersebut telah habis digunakan maka pertumbuhan output akan berhenti. Sumber daya manusia berperan pasif dalam pertumbuhan output karena jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Berbeda halnya dengan peran pasif dari sumber daya manusia, stok modal berperan aktif dalam pertumbuhan tingkat output karena jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal sampai batas maksimum sumber daya alam (Arsyad, 1999).

Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar. Dengan perluasan pasar tersebut, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2006).

b. Pandangan Robert Malthus

Dalam teorinya, Malthus mengemukakan penduduk akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dimana pertambahan penduduk meningkat secara deret ukur sedangkan pertambahan bahan makanan meningkat secara deret hitung. Seperti halnya David Ricardo, Malthus berbeda pendapat dengan Smith mengenai peran penduduk dalam pembangunan ekonomi. Menurut pendapat Smith yang belum menyadari hukum hasil yang semakin berkurang, perkembangan penduduk akan

mendorong pembangunan ekonomi karena dapat memperluas pasar. Sedangkan Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah penduduk hingga menjadi dua kali lipat dalam satu generasi sehingga dapat menurunkan kembali tingkat pembangunan ekonomi ke taraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini, pekerja akan menerima upah yang sangat minimal atau upah subsisten (Sukirno, 2006).

c. Pandangan David Ricardo

Pandangan David Ricardo mengenai proses pertumbuhan ekonomi tidak jauh berbeda dengan pendapat Adam Smith yang berfokus pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Selain itu David Ricardo juga mengungkapkan adanya keterbatasan faktor produksi tanah yang bersifat tetap sehingga akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi. Teori Ricardo ini diungkapkan pertama kali dalam bukunya yang berjudul "*The Principles of Political Economy of Taxation*" yang diterbitkan pada tahun 1917 (Arsyad, 1999).

Proses pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo dalam Sukirno (2006) adalah sebagai berikut.

1. Pada permulaannya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam masih melimpah sehingga para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena pembentukan modal tergantung pada keuntungannya, maka laba yang tinggi tersebut akan diikuti dengan pembentukan modal yang tinggi pula. Pada

tahap ini maka akan terjadi kenaikan produksi dan peningkatan permintaan tenaga kerja.

2. Pada tahapan kedua, karena jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan bertambah, maka upah akan naik dan kenaikan upah tersebut akan mendorong pertumbuhan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan mutunya akan semakin rendah. Sebagai akibatnya, setiap tambahan hasil yang diciptakan oleh masing-masing pekerja akan semakin berkurang. Dengan semakin terbatasnya jumlah tanah yang dibutuhkan (sumber daya yang tersedia), maka harga sewa lahan akan semakin tinggi. Hal ini akan mengurangi keuntungan pengusaha yang menyebabkan pengusaha tersebut untuk mengurangi pembentukan modal dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berakibat pada turunnya tingkat upah.
3. Tahap ketiga ditandai dengan menurunnya tingkat upah dan pada akhirnya akan berada pada tingkat minimal. Pada tingkat ini, perekonomian akan mencapai *stationary state*. Pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa tanah yang sangat tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan.

d. Pandangan John Stuart Mill

John Stuart Mill merupakan ahli ekonomi Klasik lain yang juga banyak mencurahkan perhatiannya pada permasalahan pembangunan. Pada umumnya pandangan Mill tidak jauh berbeda dengan pandangan ahli- ahli ekonomi Klasik

lainnya. Mill sependapat dengan pandangan Adam Smith bahwa spesialisasi atau pembagian kerja akan meningkatkan keahlian pekerja, memperbaiki organisasi produksi, dan mendorong dilakukannya inovasi. Selain itu, Mill juga sependapat dengan Adam Smith mengenai luasnya spesialisasi yang dibatasi oleh luasnya pasar. Teori yang dikemukakan oleh Mill memiliki kesamaan dengan apa yang sebelumnya telah dikemukakan oleh David Ricardo, yaitu berlakunya pertambahan penduduk secara terus menerus, sedangkan luas tanahnya terbatas, menyebabkan kegiatan ekonomi berlangsung sesuai dengan *The Law of Diminishing Returns*. Dari keadaan ini, selanjutnya Mill berpendapat bahwa jika penduduk terus menerus bertambah maka pembangunan ekonomi akan mengalami kemunduran dan pada akhirnya akan mencapai posisi stationer (Sukirno, 2006).

Salah satu sumbangan Mill dalam analisis pembangunan ekonomi adalah analisisnya mengenai peranan faktor-faktor non ekonomi dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Misalnya kebiasaan berpikir, pendidikan, adat istiadat, dan corak institusi dalam masyarakat. Selain itu, Mill juga berpendapat bahwa agar pembangunan dapat tercipta, maka perlu adanya golongan masyarakat yang dapat menciptakan pembaharuan-pembaharuan serta pentingnya peranan pendidikan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi karena dapat mempertinggi pengetahuan teknik baru dan pengetahuan umum masyarakat (Amalia, 2007).

2.1.2.2 Teori Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Teori ini melengkapi teori yang telah dikemukakan terlebih dahulu oleh Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod- Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

1. perekonomian bersifat tertutup,
2. hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan,
3. proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return scale*), serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Tarigan, 2006).

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisa dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut.

$$g = k = n$$

Dimana : g = Growth (tingkat pertumbuhan output)

k = Capital (tingkat pertumbuhan modal)

n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Agar terdapat keseimbangan maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk menghasilkan

tambahan produksi ditentukan oleh v (*capital output ratio* = rasio modal output).

Apabila tabungan dan investasi adalah sama ($I = S$), maka:

$$\frac{I}{K} = \frac{S}{K} = \frac{S}{Y} = \frac{Y}{K} = \frac{S/Y}{K/Y} = \frac{S}{V}$$

Agar pertumbuhan tersebut mantap, harus dipenuhi syarat yaitu $g = n = s/v$.

Karena s , v , dan n bersifat independen maka dalam perekonomian tertutup sulit tercapai kondisi pertumbuhan yang mantap. Harrod- Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi, kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan sisi permintaan barang (Tarigan, 2006).

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Neoklasik

Teori ini dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W Swan (1956). Model Solow- Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi. Teori ini menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital dan tenaga kerja. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja. Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga campur tangan pemerintah tidak diperlukan. Campur tangan pemerintah hanya sebatas pada kebijakan fiskal dan moneter (Tarigan, 2006).

Dalam hal ini, peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang diinginkan. Namun demikian, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengatur tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju daerah berupah rendah (Arsyad, 1999).

Dalam penyusunan strategi berdasarkan teori ini tidak jauh berbeda dengan teori klasik dimana perlunya perbaikan sarana dan prasana perhubungan sehingga memperlancar arus keluar masuk orang maupun perhubungan serta perbaikan arus komunikasi dan penyebarluasan informasi. Namun demikian, perlu diperhatikan pula pemenuhan asumsi dasar dalam teori ini yaitu pasar yang sempurna baik pasar barang dan pasar tenaga kerja.

2.1.2.4 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan GNP sebenarnya merupakan konsekuensi alamiah atas adanya ekuilibrium jangka panjang. Teori pertumbuhan endogen memiliki kemiripan struktural terhadap teori neoklasik, namun sangat berbeda dalam hal asumsi yang mendasarinya dan kesimpulannya. Perbedaan teoritis yang sangat signifikan berasal dari dikeluarkannya asumsi neoklasik tentang hasil marjinal yang semakin menurun atas investasi modal, memberikan peluang terjadinya skala hasil yang semakin meningkat dalam produksi

agregat dan seringkali berfokus pada peran eksternalitas dalam menentukan tingkat pengembalian modal. Dengan mengasumsikan bahwa investasi sektor publik dan swasta dalam sumber daya manusia menghasilkan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas yang membalikkan kecenderungan hasil yang semakin menurun yang alamiah, teori pertumbuhan endogen berupaya menjelaskan keberadaan skala hasil yang semakin meningkat dan pola pertumbuhan jangka panjang yang berbeda-beda antar negara. Karena teknologi masih memainkan peranan penting dalam teori ini, maka tidak perlu lagi untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Todaro dan Smith, 2006).

2.1.3 Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Belanja Modal

Dana yang diperoleh Pemerintah Daerah secara garis besar dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah. Namun setelah diterapkannya sistem anggaran berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Sedangkan belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Jenis belanja yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja modal yang merupakan bagian dari belanja langsung dan didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan/ pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Adapun pembentukan asset dalam belanja modal ini meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/ kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan / ternak dan tanaman serta persenjataan/ keamanan.

2.1.3.2 Hubungan antara Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan sarana dan prasana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana

penunjang lainnya. Syarat fundamental pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang meningkatkan produktivitas (Harianto dan Adi, 2007). Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, maka diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika pemerintah daerah menerapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih 2003). Dalam penelitiannya, Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian akan mendorong produktivitas penduduk yang pada gilirannya hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk pada khususnya dan pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya.

Secara teoritis, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh Musgrave dan Rostow ke dalam tiga tahap. Ketiga tahap tersebut antara lain tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah yang tercermin dalam pengeluarannya terhadap total investasi besar karena pemerintah perlu menyediakan prasana pendukung seperti transportasi, pendidikan

dan sebagainya. Kemudian pada tahap menengah, peranan investasi swasta semakin besar sehingga proporsi investasi pemerintah mulai berkurang. Walaupun demikian pada tahap ini, peran investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tahap lanjut, investasi pemerintah berupa penyediaan barang publik melonjak drastis karena timbul kegagalan akibat peran investasi swasta yang tidak terkendali (Mangkoesobroto, 2001).

Selain Musgrave dan Rostow, Wagner juga mengemukakan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan Hukum Wagner. Hukum tersebut adalah sebagai berikut : Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum tersebut dikeluarkan berdasarkan pengamatan empiris yang telah dilakukan oleh Wagner terhadap beberapa negara maju seperti USA, Jerman dan Inggris. Dengan semakin tumbuhnya perekonomian, maka hubungan yang timbul pun baik antara industri dengan industri maupun dengan masyarakat akan semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat dengan semakin tumbuhnya perekonomian (Mangkoesobroto, 2001).

Teori lain yang juga membahas mengenai peran pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan GNP sebenarnya merupakan konsekuensi alamiah atas adanya ekuilibrium jangka panjang. Teori pertumbuhan

endogen memiliki kemiripan struktural terhadap teori neoklasik, namun sangat berbeda dalam hal asumsi yang mendasarinya dan kesimpulannya. Perbedaan teoritis yang sangat signifikan berasal dari dikeluarkannya asumsi neoklasik tentang hasil marjinal yang semakin menurun atas investasi modal, memberikan peluang terjadinya skala hasil yang semakin meningkat dalam produksi agregat dan seringkali berfokus pada peran eksternalitas dalam menentukan tingkat pengembalian modal. Dengan mengasumsikan bahwa investasi sektor publik dan swasta dalam sumber daya manusia menghasilkan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas yang membalikkan kecenderungan hasil yang semakin menurun yang alamiah, teori pertumbuhan endogen berupaya menjelaskan keberadaan skala hasil yang semakin meningkat dan pola pertumbuhan jangka panjang yang berbeda-beda antar negara. Karena teknologi masih memainkan peranan penting dalam teori ini, maka tidak perlu lagi untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sodik (2007), Indrawati (2007) dan Ma'ruf dan Wihastuti (2008), pengeluaran pemerintah berupa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1 Angkatan Kerja

Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk yang besar berperan dalam

menyediakan tenaga kerja produktif yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi.

Angkatan kerja adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah mampu secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan. Menurut BPS, angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan.

Dalam penelitian ini, angkatan kerja yang digunakan adalah angkatan kerja yang bekerja yang didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontinu selama seminggu yang lalu.

2.1.4.2 Hubungan antara Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Todaro dan Smith (2006) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Namun demikian, pertumbuhan angkatan kerja di satu sisi dapat berdampak positif namun di sisi lain dapat berdampak negatif pada pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

Dampak yang ditimbulkan tersebut tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor positif yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja (Todaro dan Smith, 2006).

Kemudian melalui kajian empiris yang dilakukan oleh Sodik (2007), Pujiati (2007) serta Sumiyarti dan Imamy (2005) diperoleh kesimpulan bahwa angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.5 Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

2.1.5.1 Pendidikan

Investasi di bidang sumber daya manusia adalah pengorbanan sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi. Imbalan yang akan diperoleh adalah tingkat penghasilan yang lebih tinggi untuk

mampu mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula. Salah satu bentuk investasi sumber daya manusia adalah berupa peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam Atmanti (2005), beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan di dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian adalah :

- a. Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.
- b. Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya.

Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.

2.1.5.2 Hubungan antara Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan mempengaruhi fertilitas masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu daerah.

Menurut Kuznets (dikutip dari Khusaini, 2007), sebagian besar stok dari negara-negara maju bukanlah modal fisik tetapi justru ada pada manusia yang berpengetahuan dan terlatih yang menggunakannya secara efektif. Hal ini juga yang membedakan tingkat pertumbuhan antara negara maju dan negara sedang berkembang. Hal ini dikatakan juga oleh Lim (dikutip dari Khusaini, 2007) bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jepang dan Korea Selatan besar kemungkinan disebabkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini terlihat dari tingkat melek huruf yang tinggi, sehingga tenaga kerja mudah menyerap dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi yang terjadi.

Teori *Human Capital* merupakan teori yang mendasari pentingnya pendidikan bagi seseorang. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti di satu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Namun, di pihak lain menambah satu tahun sekolah berarti menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Implikasi dari teori *human capital* terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dengan semakin membaiknya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan di suatu negara/ daerah maka akan menciptakan sumber daya manusia

yang berkualitas yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi di masa depan dan mampu untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efektif (Simanjuntak, 2001).

Isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776, yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, dengan mengisolasi dua faktor yaitu 1) pentingnya skala ekonomi, dan 2) pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Faktor kedua ini merupakan isu utama tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Khusaini, 2007).

Selain Adam Smith, ekonom klasik yang turut berperan dalam menyumbang pemikiran tentang peran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah John Stuart Mill. Menurut Mill, pembangunan ekonomi sangat tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus hambatan pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan dan berpikir tradisional. Perbaikan dalam pendidikan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, perluasan spesialisasi dan perbaikan dalam organisasi produksi merupakan faktor yang penting yang akan memperbaiki mutu dan efisiensi faktor-faktor produksi dan akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi. Selain itu, faktor pendidikan melaksanakan dua fungsi yaitu: mempertinggi pengetahuan teknik masyarakat dan mempertinggi ilmu pengetahuan umum. Pendidikan dapat menciptakan pandangan-pandangan dan kebiasaan modern dan besar perannya untuk menentukan kemajuan ekonomi masyarakat (Amalia, 2007).

Tidak hanya ekonom Klasik saja yang beranggapan bahwa modal manusia terutama pendidikan merupakan faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, namun Teori Neoklasik dan Teori Pertumbuhan Endogen juga berpandangan sama. Teori Klasik menurut Solow menggambarkan pendapatnya dalam bentuk fungsi produksi standar dimana output dihasilkan dengan menggunakan input modal fisik dan tenaga kerja. Dalam teori pertumbuhan Solow ini, kualitas sumber daya manusia dikategorikan sebagai masukan tersendiri yang mempengaruhi produktivitas (Budiono, 2009).

Sedangkan teori pertumbuhan endogen berpandangan bahwa sumber-sumber pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal dalam arti yang luas. Dampak investasi fisik dan kualitas sumber daya manusia serta investasi dalam riset dan teknologi biasanya tidak sepenuhnya ditangkap oleh investor. Hal ini berarti kegiatan investasi yang dilakukan akan menyebabkan *spill over* sektor lain. Adanya stok pengetahuan maupun ide-ide baru dalam perekonomian mendorong munculnya motivasi yang dapat diwujudkan dalam kegiatan inovatif yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Bagi perekonomian agregat, hal ini akan menciptakan kondisi *increasing return to scale* akibat dari eksternalitas perkembangan pengetahuan (Todaro dan Smith, 2006).

Sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu, Budiono (2009) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.6 Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

2.1.6.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah proses multidimensi yang kompleks dan implikasinya, pencapaian ekonomi sulit untuk diisolasi dari pengaruh-pengaruh faktor budaya, politik, kelembagaan dan sejarah. Parker (dikutip oleh Tambunan, 2010) menggambarkan desentralisasi dalam tiga kategori yaitu dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. Dekonsentrasi adalah penyerahan tanggung jawab suatu pemerintahan pusat kepada kantor-kantor cabang di daerah atau unit administrasi lokal. Delegasi menunjukkan situasi dimana kegiatan pemerintah daerah sebagai perwakilan bagi pemerintah pusat dan melaksanakan sebagian fungsi tertentu. Sedangkan devolusi menunjukkan situasi dimana tidak hanya pelaksanaan tetapi juga kewenangan dalam memutuskan sesuatu berada di tangan pemerintah lokal.

Menurut Pujiati (2007), desentralisasi merupakan bagian dari strategi kompetitif setiap institusi/ negara yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Desentralisasi memiliki perbedaan makna dengan otonomi. Otonomi atau sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan sedangkan desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Menurut Prawirosetoto (dikutip oleh Pujiati, 2007), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*).

Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dalam era sebelum desentralisasi fiskal, pelaksanaan kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sampai dengan tahun 2000 telah mengakibatkan daerah kaya bertambah kaya dan sebaliknya daerah miskin menjadi lebih miskin yang disebabkan oleh perbedaan letak geografis dan kondisi ekologis, sumber daya alam serta tingkat sosial ekonomi. Selain itu, juga ditemui ketidakjelasan wewenang pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembagian tugas-tugas pembantuan dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah menjadi kabur. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kegiatan antar instansi yang berakibat lebih lanjut pada pemborosan pembiayaan dari sumber dana yang terbatas (Ghany, 2006).

Secara efektif pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 sesuai dengan Undang-undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004. Sesuai dengan kedua undang-undang tersebut, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kedua undang-undang tersebut merefleksikan

pembagian kekuasaan di bidang pemerintahan yang luas kepada Daerah, memberikan kepastian sumber dana pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, serta kebebasan dalam menggunakan dana tersebut sesuai dengan fungsinya (Ghany, 2006).

Sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dana perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam membiayai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar Daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu. Pengaturan dana bagi hasil dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 ini merupakan penyesuaian dengan

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Dalam undang-undang ini dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/ 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari dana alokasi khusus dialihkan menjadi dana bagi hasil.

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. Dana alokasi umum suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Alokasi dana alokasi umum bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil maka akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relatif kecil. Sebaliknya, alokasi Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relatif besar.

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan Daerah.

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan dana darurat. Pendapatan hibah terdiri atas hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, Pemerintah, badan/ lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Kemudian, dana darurat merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

2.1.6.2 Hubungan antara Indikator Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi ini secara teoritis oleh beberapa ahli dijelaskan melalui *Tiebout models* (dikutip dari Sumarsono dan Utomo, 2009). Berdasarkan teori *Tiebout Model* yang menjadi landasan konsep desentralisasi fiskal, bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang maka akan

meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien. Kondisi peningkatan pelayanan barang publik ini dalam kaitannya dengan hubungan antar daerah otonom akan meningkatkan persaingan antar kabupaten/ kota untuk memaksimalkan kepuasan bagi masyarakatnya. Peningkatan kemampuan daerah oleh pemerintah daerah yang bersangkutan adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan (Sumarsono dan Utomo, 2009).

Pendapat yang sama mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi juga diungkapkan oleh Oates (1993). Menurut Oates (1993 dikutip dari Sasana, 2009), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi dimana pemerintah daerah lebih mengerti kebutuhan masyarakat dan keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga mampu untuk membuat pembelanjaan yang lebih efisien.

Dengan menyoroti penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia hingga saat ini, masih didominasi dari sisi penerimaan yaitu bagaimana daerah dapat secara efektif memanfaatkan berbagai sumber penerimaan daerahnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah atau efektivitas fiskal daerah. Kerangka yang digunakan untuk mengukur efektivitas fiskal sebagai salah satu indikator desentralisasi fiskal adalah kontribusi/ peran pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sodik (2007) dengan Judul “Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus Data Panel di Indonesia” . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis ekonometrik dengan mengaplikasikan metode GLS (*General Least Square*), dan menggunakan data panel yang terdiri atas 26 provinsi di Indonesia selama periode 1993-2003. Sedangkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain investasi swasta (I_p), investasi pemerintah yang diproksi dengan belanja daerah (I_g), konsumsi pemerintah (C_g), angkatan kerja (L), dan tingkat keterbukaan ekonomi daerah ($X-M$). Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\ln y_{it} = \ln a + \alpha_1 \ln I_{p_{it}} + \alpha_2 \ln I_{g_{it}} + \alpha_3 \ln C_{g_{it}} + \alpha_4 \ln (X-M)_{it} + \alpha_5 \ln L_{it} + \varepsilon_{it}$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian ditemukan bahwa variabel investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sedangkan pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai

dengan kemampuannya sendiri. Variabel keterbukaan ekonomi memiliki hubungan yang konsisten dengan teori. Sedangkan variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan dengan tanda negatif untuk tahun 1993-2003 dan tahun 1998-2000 (sebelum era otonomi). Hal ini menunjukkan bahwa daerah belum bisa menyerap angkatan kerja yang ada di daerah. Sedangkan untuk periode 2001-2003 (setelah otonomi daerah), variabel ini tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pujiati (2007) dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di wilayah Karesidenan Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan antara *Time Series* dan *Cross Section*. Data *Time Series* dari tahun 2002-2006 dan obyeknya adalah 6 kabupaten/ kota di wilayah Karesidenan Semarang yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Model yang digunakan untuk mengestimasi persamaan regresi dalam penelitian ini adalah *Fixed Effects model*. Sedangkan metode yang dipilih adalah Metode GLS (*Generalized Least Squares*). Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$LY_t = \alpha_0 + \alpha_1 LPAD + \alpha_2 LDBH + \alpha_3 LDAU + \alpha_4 LTK + \varepsilon_t$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta tenaga kerja sebagai faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2007) dengan judul “ Peranan Pengeluaran Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi di Era Orde Baru dan Era Reformasi”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa jauh peranan pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di era baru dan era reformasi di Indonesia. Penelitian ini terdiri atas 3 variabel yaitu 1 variabel dependen yaitu PDB atau Pendapatan Nasional dan 2 variabel independen yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Metode analisis yang dipilih adalah metode OLS dengan analisis regresi sederhana. Persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = a_0 + b_1G + b_2Ip + u$$

Dimana :

Y = Pendapatan Nasional (PDB)

G = Pengeluaran Rutin

Ip = Pengeluaran Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan secara bersama-sama mempunyai

pengaruh yang kuat terhadap pendapatan nasional (PDB), yang ditunjukkan oleh R Square yang mendekati satu dan uji F cukup signifikan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Brata (2002) dengan judul “ Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji secara empiris hubungan dua arah antara pembangunan manusia dan kinerja ekonomi regional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode TSLS (*Two Stge Least Square*) dengan maksud untuk meminimalkan bias simultan yang ada dalam model simultan. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$(1) LPDRB = a_0 + a_1RPMTDB + a_2IPM + a_3 IG + a_4RMIGAS + a_5DK + f$$

$$(2) IPMI = b_0 + b_1LPDRB + b_2IG + b_3LLSP + b_4RMIGAS + b_5DK + e$$

Dimana :

LPDRB = Produk Domestik Regional Bruto per kapita harga konstan 1993 (dalam nilai logaritma)

RPMTDB = Rasio Pembentukan Tetap Domestik Bruto harga konstan terhadap PDRB (dalam %)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia Regional

IG = Indeks Gini Regional

RMIGAS = Rasio dan Gas terhadap PDRB (dalam %)

DK = Variabel boneka provinsi yang mengalami konflik (konflik=1, tidak = 0)

LLSP = Rata-rata lama sekolah perempuan (dalam nilai logaritma)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil estimasi model IPM menunjukkan bahwa variabel PDRBK terbukti sangat signifikan pengaruhnya terhadap tingkat pembangunan manusia yang dilihat dari IPM. Selain itu, variabel lama pendidikan sekolah perempuan juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia. Sedangkan indeks Gini, rasio migas dan variabel boneka konflik tidak signifikan pengaruhnya terhadap IPM. Adapun dalam estimasi model PDRBK hanya variabel boneka konflik (DK) saja yang tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi. Begitu pula halnya dengan variabel tingkat investasi (RPM TDB) yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Budiono (2009) dengan judul “Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Penekanan pada Investasi Pendidikan)”. Tujuan penelitian ini adalah sejauh mana investasi-investasi sumber daya manusia, investasi modal fisik dan faktor-faktor demografi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metode yang digunakan adalah OLS (*Ordinat Least Square*) dengan analisis regresi sederhana selain itu juga menggunakan Rata-rata RoR (Rate of Return), Marginal Rate of Return (RoR) Pendidikan. Penelitian dilakukan pada 26 provinsi di Indonesia pada tahun 2002 (*cross section*). Model dalam penelitian terdiri atas dua model antara lain sebagai berikut.

Model I

$$\text{PDRBk} = a_0 + a_1\text{Educ}_1 + a_2\text{Educ}_2 + a_3\text{Educ}_3 + a_4\text{PMTDBk} + a_5\text{POPGR} + a_6\text{URBN}$$

Model II

$$\text{PDRBk} = b_0 + b_1\text{EPRY} + b_2\text{ESC} + b_3\text{EPS} + b_4\text{PMTDBk} + b_5\text{POPGR} + b_6\text{URBN}$$

Dimana :

PDRBk = Produk Regional Domestik Bruto masing-masing provinsi per kapita.

Educ₁ = Proporsi Tenaga Kerja berpendidikan kategori 1 yaitu tidak tamat SD dan lulus SD terhadap total seluruh tenaga kerja provinsi.

Educ₂ = Proporsi Tenaga Kerja berpendidikan kategori 2 yaitu tamat SMP dan SMA terhadap total seluruh tenaga kerja provinsi.

Educ₃ = Proporsi Tenaga Kerja berpendidikan kategori 3 yaitu tamat DI/ DII, DIII dan universitas terhadap total seluruh tenaga kerja provinsi.

Sedangkan

EPRY = Lamanya (tahun) memperoleh pendidikan dalam tingkat pendidikan dasar setiap tenaga kerja untuk masing-masing provinsi.

ESC = Lamanya (tahun) memperoleh pendidikan dalam tingkat pendidikan lanjutan setiap tenaga kerja untuk masing-masing provinsi.

EPS = Lamanya (tahun) memperoleh pendidikan dalam pendidikan tinggi setiap tenaga kerja untuk masing-masing provinsi.

PMTDBk = Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto provinsi per kapita.

POPGR = Pertumbuhan penduduk provinsi.

URBN = Proporsi penduduk urban dibandingkan dengan penduduk rural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua model menyatakan pentingnya sumberdaya manusia dan modal fisik bagi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, baik *Average* maupun *Marginal Rate of Return* sumber daya manusia lebih tinggi dibandingkan dengan investasi fisik.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'aruf dan Wihastuti (2008) dengan judul "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan Prospeknya". Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan beberapa variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang pada tingkat provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 26 provinsi selama kurun waktu 1980-2006. Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\text{Log(PDRBP}_{ct}) = a_1 + a_2\text{Log(PDRBP}_{ct-1}) + a_3\text{Log(EX}_{ct}) + a_4\text{Log(DEF}_{ct}) + a_5\text{Log(OPN}_{ct}) + a_6\text{Log(INF}_{ct}) + a_7\text{Log(POP}_{ct}) + a_8D_{sda} + a_9D_{lok} + a_{10}D_{des} + e_{ct}$$

Dimana :

$\text{Log(PDRBP}_{ct})$: Produk Domestik Regional Bruto per kapita riil

$\text{Log}(\text{PDRBP}_{ct-1})$: Produk Domestik Regional Bruto per kapita riil tahun sebelumnya

$\text{Log}(\text{EX}_{ct})$: pengeluaran pemerintah riil

$\text{Log}(\text{DEF}_{ct})$: deficit anggaran pemerintah riil

$\text{Log}(\text{OPN}_{ct})$: derajat keterbukaan perekonomian riil

$\text{Log}(\text{INF}_{ct})$: inflasi

$\text{Log}(\text{POP}_{ct})$: populasi penduduk

D_{sda} : binary sumber daya alam

D_{lok} : binary lokasi

D_{des} : dummy desentralisasi

e_{ct} : *error term*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien pengeluaran pemerintah riil adalah positif dan signifikan. Artinya pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan pengaruh variabel-variabel lain dalam persamaan tersebut antara lain : pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah riil, defisit anggaran pemerintah riil, derajat keterbukaan perekonomian riil, binary lokasi, binary sumber daya alam dan dummy desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan inflasi dan populasi penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sumiyarti dan Imamy (2005) dengan judul “ Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat-Daerah terhadap Perekonomian Kota Depok”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketergantungan fiskal pusat-daerah yang tercermin dari dana perimbangan terhadap kemajuan ekonomi selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh PAD dan Tenaga Kerja sebagai cerminan sumber daya yang dimiliki oleh daerah terhadap kemajuan ekonomi daerah yang bersangkutan. Metode yang digunakan adalah OLS selama kurun waktu kuartalan 2000:1 – 2003:4.

Model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$LPDRB_t = \alpha_0 + \alpha_1 LPAD_t + \alpha_2 LDP_t + \alpha_3 LTK_t + e_t$$

Keterangan :

$LPDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000

$LPAD_t$ = Pendapatan Asli Daerah Kota Depok yang tercantum dalam laporan realisasi APBD Depok.

LDP_t = Dana Perimbangan Kota Depok yang tercantum dalam laporan realisasi APBD Depok.

LTK_t = tenaga kerja yaitu jumlah tenaga kerja dari jumlah angkatan kerja Kota Depok berusia 10 tahun ke atas yang bekerja.

α_0 = konstanta

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = parameter yang diestimasi merupakan persentase perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh perubahan masing-masing variabel independen sebesar 1%.

e_t = error term

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan PDRB kota Depok, variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan dan variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan. Kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 96,94% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metodelogi Penelitian	Kesimpulan
1.	Sodik (2007)	Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus Data Panel di Indonesia	untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Metode analisis yang digunakan adalah metode GLS (<i>General Least Square</i>). <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen : pertumbuhan ekonomi • Variabel Independen : investasi swasta (Ip), investasi pemerintah yang diproksi dengan belanja daerah (Ig), konsumsi pemerintah (Cg), angkatan kerja (L), dan tingkat keterbukaan ekonomi daerah (X-M). 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> • Investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. • Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. • Keterbukaan ekonomi memiliki hubungan konsisten dengan teori tetapi tidak signifikan. • Variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan dengan tanda negative terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

2.	Pujiati (2007)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang era Desentralisasi Fiskal	Untuk mengestimasi pengaruh variabel keuangan daerah (PAD, DAU, DBH) dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten / kota di wilayah Karesidenan Semarang.	Metode yang digunakan adalah GLS (<i>Generalized Least Squares</i>). <ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen : pertumbuhan ekonomi • Variabel independen : PAD, DAU, DBH dan tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. • DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. • DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. • Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	Indrawati (2007)	Peranan Pengeluaran Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi di Era Orde Baru dan Era Reformasi	Untuk melihat seberapa besar peranan pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dalam era baru dan era reformasi.	Metode yang digunakan adalah OLS. <ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen : pertumbuhan ekonomi. • Variabel independen : pengeluaran rutin dan pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik di era orde baru maupun reformasi. • Pengeluaran rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik di era orde baru maupun reformasi.

4.	Brata (2002)	Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia	Untuk mengkaji secara empiris hubungan dua arah antara pembangunan manusia dan kinerja ekonomi regional di Indonesia.	<p>Metode yang digunakan adalah TSLS (<i>Two Stage Least Square</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen : pertumbuhan ekonomi dan IPM • Variabel independen : investasi swasta, IPM, Indeks Gini, Rasio migas, variabel boneka dan rata-rata lama sekolah perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen IPM : variabel PDRBK terbukti sangat signifikan pengaruhnya terhadap tingkat pembangunan manusia yang dilihat dari IPM. Selain itu, variabel lama pendidikan sekolah perempuan juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia. Sedangkan indeks Gini, rasio migas dan variabel boneka konflik tidak signifikan pengaruhnya terhadap IPM. • Variabel dependen pertumbuhan ekonomi : variabel boneka konflik (DK) saja yang tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi. Begitu pula halnya dengan variabel tingkat investasi (RPMTDB) yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
----	--------------	---	---	---	--

5.	Budiono (2009)	Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Penekanan pada Investasi Pendidikan)	Sejauh mana investasi-investasi sumber daya manusia, investasi modal fisik dan faktor-faktor demografi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Average Rate of Return • Marginal Rate of Return • OLS dengan 2 model: <ol style="list-style-type: none"> 1. Model I 2. Model II • Variabel dependen kedua model : Pertumbuhan ekonomi : PDRBk • Variabel independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Model I : Educ₁, Educ₂, Educ₃, PMTDBk, POPGR, URBN. 2. Model II : EPRY, ESC, EPS, PMTDBk, POPGR, URBN. • Data <i>cross section</i> pada 26 provinsi di Indonesia pada tahun 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua model menyatakan pentingnya sumberdaya manusia dan modal fisik bagi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, baik <i>Average</i> maupun <i>Marginal Rate of Return</i> sumber daya manusia lebih tinggi dibandingkan dengan investasi fisik.
6.	Ma'ruf dan Wihastuti (2008)	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan Prospeknya	Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan beberapa variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang pada tingkat provinsi di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis data panel yang terdiri atas 26 provinsi selama kurun waktu 1980-2006. • Variabel dependen : pertumbuhan ekonomi. • Variabel independen : pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, pengeluaran pemerintah riil, defisit anggaran pemerintah riil, derajat keterbukaan ekonomi riil, inflasi, populasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien pengeluaran pemerintah riil adalah positif dan signifikan. Artinya pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

				<p>penduduk, binary lokasi, binary sumber daya alam dan dummy desentralisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis OLS (dalam logaritma). 	
7.	Sumiyarti dan Imamy (2005)	Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat-Daerah terhadap Perekonomian Kota Depok.	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketergantungan fiskal pusat- daerah yang tercermin dari dana perimbangan terhadap kemajuan ekonomi. • Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PAD, dan tenaga kerja sebagai cerminan sumber daya yang dimiliki oleh daerah terhadap kemajuan ekonomi daerah yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan OLS. • Kurun waktu penelitian kuartalan 2000:1-2003:4 (<i>time series</i>). • Variabel dependen: pertumbuhan ekonomi • Variabel independen : PAD, Dana Perimbangan, dan Tenaga Kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan PDRB kota Depok, variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan dan variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan. Kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 96,94% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

2.3 Kerangka Pemikiran

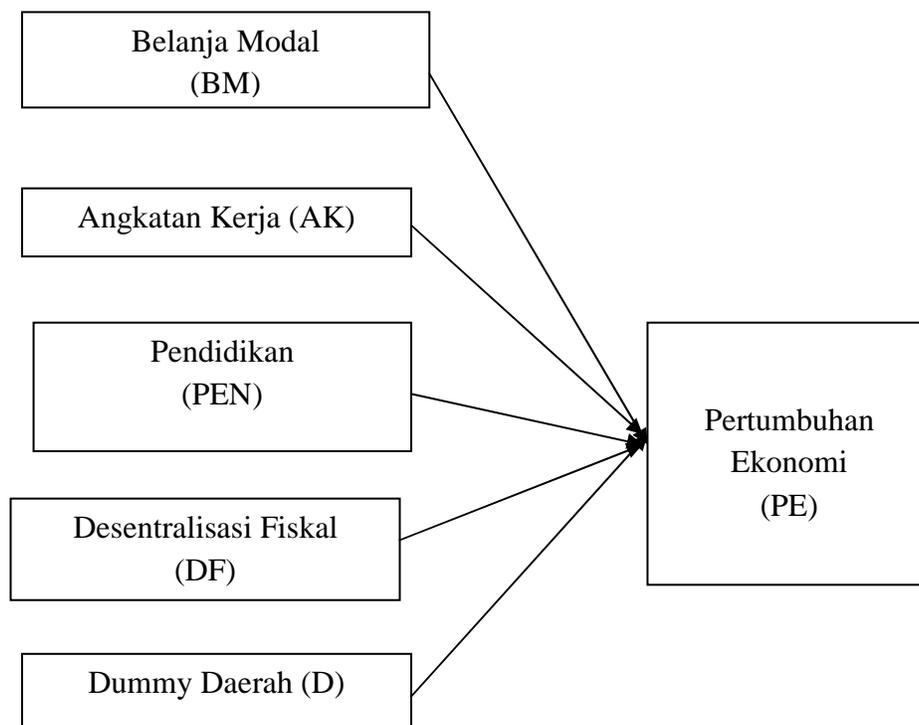
Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

Menurut Todaro dan Smith (2006), tiga faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain akumulasi modal dalam bentuk investasi, partisipasi tenaga kerja lokal dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal dalam bentuk investasi diyakini sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah baik yang dilakukan oleh swasta maupun oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk investasi modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah alokasi belanja modal yang salah satunya ditujukan untuk pembangunan sarana prasana publik. Dalam penelitian ini, belanja modal yang digunakan adalah belanja modal tahun sebelumnya karena adanya *lag*.

Selain investasi, penduduk merupakan faktor utama lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peranan penduduk dalam penelitian ini dalam bentuk tenaga kerja produktif (angkatan kerja) dan kualitas penduduk (pendidikan). Semakin besar jumlah tenaga kerja produktif maka output yang dihasilkan oleh perekonomian akan meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga meningkat. Kemudian, dari segi kualitasnya yaitu pendidikan. Sebagai salah satu bentuk dari investasi sumber daya manusia, pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu daerah.

Diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia pada tahun 2001 juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai dengan *Tiebout Model* dan pendapat Oates, dengan adanya pelimpahan wewenang di bidang fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka akan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien. Selain itu, desentralisasi fiskal juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah dianggap lebih mengerti sejauh mana kebutuhan masyarakat dan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Untuk lebih memperjelas kerangka pemikiran dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Dummy daerah menggambarkan perbedaan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah antara pusat pertumbuhan dan daerah pendukungnya.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara mengenai pengaruh variabel-variabel dependen dan independen berdasarkan kerangka teoritis maupun penelitian terdahulu. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Diduga belanja modal (BM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga angkatan kerja (AK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Diduga pendidikan (PEN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Diduga indikator desentralisasi fiskal (DF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (PE). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini antara lain belanja modal tahun sebelumnya (BM), angkatan kerja (AK), pendidikan (PEN) dan desentralisasi fiskal (DF).

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Variabel Dependen

- Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Variabel pertumbuhan ekonomi ini diproksi dengan perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Satuan yang digunakan adalah Juta Rp. Data diperoleh dari BPS.

b. Variabel Independen

- Belanja Modal (BMt_1)

Variabel belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan/ pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Dalam penelitian belanja modal yang digunakan adalah belanja modal tahun sebelumnya. Variabel ini dinyatakan dalam satuan Juta Rupiah. Data diperoleh dari BPS.

- Angkatan Kerja (AK)

Angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja (berusia 10 tahun ke atas) yang bekerja, yaitu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang/ jasa secara kontinu paling sedikit satu jam dalam seminggu di Provinsi Jawa Tengah. Variabel ini dinyatakan dalam satuan orang dan data diperoleh dari BPS.

- Pendidikan (PEN)

Pendidikan dalam penelitian ini diproksi dengan penduduk berumur 10 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dibanding dengan jumlah penduduk menurut

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Variabel ini dinyatakan dalam satuan persen. Data diperoleh dari BPS.

- Desentralisasi Fiskal (DF)

Variabel desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diproksi dengan realisasi pendapatan asli daerah dibanding dengan total penerimaan daerah atau dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut.

$$DF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

DF = Desentralisasi Fiskal (%)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rp)

TPD = Total Penerimaan Daerah (Miliar Rp)

Variabel ini dinyatakan dengan satuan persen. Data diperoleh dari BPS.

- *Dummy variable*

Dalam estimasi model panel data ini menggunakan variabel *dummy*, yaitu *dummy* daerah yang meliputi kabupaten/ kota di Jawa Tengah dengan daerah acuan (*benchmark*) Kota Semarang karena selama periode penelitian Kota Semarang memiliki perubahan nilai PDRB paling tinggi. Penggunaan *dummy* daerah dalam penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan yang terjadi antar daerah (Kabupaten/ Kota) dalam enam tahun periode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan tiga puluh empat *dummy* daerah yaitu *dummy* Kab. Cilacap, *dummy* Kab. Banyumas,

dummy Kab. Purbalingga, *dummy* Kab. Banjarnegara, *dummy* Kab. Kebumen, *dummy* Kab. Purworejo, *dummy* Kab. Wonosobo, *dummy* Kab. Magelang, *dummy* Kab. Boyolali, *dummy* Kab. Klaten, *dummy* Kab. Sukoharjo, *dummy* Kab. Wonogiri, *dummy* Kab. Karanganyar, *dummy* Kab. Sragen, *dummy* Kab. Grobogan, *dummy* Kab Blora, *dummy* Kab. Rembang, Kab. Pati, *dummy* Kab. Kudus, *dummy* Kab. Jepara, *dummy* Kab. Demak, *dummy* Kab. Semarang, *dummy* Kab. Temanggung, *dummy* Kab. Kendal, *dummy* Kab. Batang, *dummy* Kab Pekalongan, *dummy* Kab. Pemalang, *dummy* Kab. Tegal, *dummy* Kab. Brebes, *dummy* Kota Magelang, *dummy* Kota Surakarta, *dummy* Kota Salatiga, *dummy* Kota Pekalongan, dan *dummy* Kota Tegal.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* yaitu data dari 35 kabupaten/ kota di provinsi Jawa Tengah dan data *time series* dari tahun 2004-2009 (6 tahun) sehingga jumlah observasi sebesar 210 observasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini dapat diperoleh dari berbagai instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti BPS (Badan Pusat Statistik) maupun Departemen Terkait serta literatur-literatur tertulis baik yang diperoleh dari instansi terkait maupun internet. Adapun jenis data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2009.
- b. Data realisasi belanja modal masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2008.
- c. Data angkatan kerja kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009.
- d. Data penduduk berumur 10 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan minimum SMA masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009.
- e. Data jumlah penduduk masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009.
- f. Data pendapatan asli daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009.
- g. Data total penerimaan daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk tahunan dari Badan Pusat Statistik dan situs resmi Bappeda Jateng.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif adalah suatu cara analisa langsung dari hasil evIEWS dan tabel dengan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam tabel seperti rata-rata, persentase dan ukuran statistik lainnya. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel realisasi belanja modal tahun sebelumnya (BMT₁), jumlah angkatan kerja yang bekerja (AK), tingkat pendidikan (PEN) dan desentralisasi fiskal (DF) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003).

Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Ghozali, 2005).

3.4.1 Estimasi Model Regresi

Secara matematis model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$PE = f(BMT_1, AK, PEN, DF) \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana:

PE : Pertumbuhan Ekonomi

BMt₁ : Belanja Modal tahun sebelumnya

AK : Angkatan Kerja

PEN : Pendidikan

DF : Desentralisasi Fiskal

Model persamaan regresi dalam penelitian ini didasarkan pada model yang pernah digunakan oleh Amin Pujiati (2007) dan Jamzani Sodik (2007) dengan mentransformasikan persamaan regresi ke dalam bentuk logaritma. Sehingga persamaannya:

$$\text{LogPE}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LogBM}_{it-1} + \alpha_2 \text{LogAK}_{it} + \alpha_3 \text{LogPEN}_{it} + \alpha_4 \text{LogDF}_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Persamaan (3.2) menunjukkan hubungan logaritma atau hubungan elastisitas variabel-variabel independen terhadap variabel dependen atau sensitivitas variabel independen terhadap variabel dependen yang menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Dimana :

LogPE_{it} = Logaritma Pertumbuhan Ekonomi

LogBM_{it-1} = Logaritma Realisasi Belanja Modal tahun sebelumnya

LogAK_{it} = Logaritma Jumlah Angkatan Kerja

LogPEN_{it} = Logaritma Tingkat Pendidikan

LogDF_{it} = Logaritma Indikator Desentralisasi Fiskal

α_0 = konstanta

$\alpha_1 - \alpha_6$ = koefisien parameter

ε_{it} = *error term*

3.4.2 Estimasi Model Regresi dengan Data Panel

Data panel (*pooled data*) merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Tiga metode yang bisa digunakan dalam menganalisis dengan menggunakan data ini antara lain sebagai berikut.

1. *Pooled Least Square* (PLS). Untuk mengestimasi data panel dengan metode OLS.
2. *Fixed Effect* (FE). Dengan menambahkan model dummy pada data panel.
3. *Random Effect* (RE). Dengan memperhitungkan *error term* dari data panel dengan metode *least square*.

Dalam Ghozali (2006) penggunaan data panel dalam penelitian ini memiliki beberapa keuntungan antara lain :

1. Karena data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, kota, negara dan seterusnya sepanjang waktu, maka akan bersifat heterogen dalam unit tersebut. Teknik untuk mengestimasi data panel dapat memasukkan heterogenitas secara eksplisit untuk setiap variabel individu secara spesifik.
2. Dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*, maka data panel memberikan data yang lebih informative, lebih bervariasi, rendah tingkat kolinearitas antar variabel, lebih besar *degree of freedom* dan lebih efisien.
3. Dengan mempelajari data *repeated cross section*, data panel cocok untuk studi perubahan dinamis.
4. Data panel mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi melalui data murni *time series* atau murni *cross section*.

5. Data panel memungkinkan untuk mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.

Dalam mengestimasi model regresi dengan data panel didasarkan pada asumsi yang digunakan terhadap intercept, koefisien slope dan error term μ_{it} . Dalam Ghozali (2006), beberapa kemungkinan tersebut antara lain:

1. Diasumsikan intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu (*across time*) dan ruang (*space*). Sedangkan error term mencerminkan perbedaan sepanjang waktu dan individu.
2. Koefisien slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu.
3. Koefisien slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu dan waktu.
4. Semua koefisien baik intercept maupun koefisien slope bervariasi untuk setiap individu.
5. Intercept dan koefisien slope bervariasi untuk setiap individu dan waktu.

Dalam penelitian ini, pengaruh variabel-variabel realisasi belanja modal tahun sebelumnya (BM), jumlah angkatan kerja yang bekerja (AK), tingkat pendidikan (PEN) dan desentralisasi fiskal (DF) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) menggunakan metode FEM (*Fixed Effect Model*) dikarenakan N (jumlah observasi) besar dan T (jumlah waktu) kecil. Selain itu, unit *cross section* dalam penelitian ini tidak diambil secara acak (Gujarati, 2003).

Kemudian asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tapi intersep bervariasi antar daerah. Bentuk

model *fixed effect* adalah dengan memasukan variabel *dummy* untuk menyatakan perbedaan intersep. Ketika *dummy* digunakan untuk mengestimasi *fixed effect*, maka persamaan tersebut disebut sebagai *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Penggunaan *dummy* dalam pada penelitian ini yaitu menggunakan *dummy* daerah.

Penggunaan *dummy* daerah dalam penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan yang terjadi antar daerah (kabupaten/ kota) dalam periode enam tahun penelitian, dimana Kota Semarang digunakan sebagai daerah acuan (*benchmark*). Alasan penggunaan Kota Semarang sebagai *benchmark* adalah karena Kota Semarang memiliki nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 yang paling tinggi selama periode penelitian.

Setelah memasukkan variabel *dummy* daerah ke dalam persamaan (3.4) maka model persamaannya adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{LogPE}_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{LogBM}_{it-1} + \alpha_2 \text{LogAK}_{it} + \alpha_3 \text{LogPEN}_{it} + \alpha_4 \text{LogDF}_{it} + \beta_1 D_1 + \beta_2 D_2 + \\ & \beta_3 D_3 + \beta_4 D_4 + \beta_5 D_5 + \beta_6 D_6 + \beta_7 D_7 + \beta_8 D_8 + \beta_9 D_9 + \beta_{10} D_{10} + \beta_{11} D_{11} + \\ & \beta_{12} D_{12} + \beta_{13} D_{13} + \beta_{14} D_{14} + \beta_{15} D_{15} + \beta_{16} D_{16} + \beta_{17} D_{17} + \beta_{18} D_{18} + \beta_{19} D_{19} + \\ & \beta_{20} D_{20} + \beta_{21} D_{21} + \beta_{22} D_{22} + \beta_{23} D_{23} + \beta_{24} D_{24} + \beta_{25} D_{25} + \beta_{26} D_{26} + \beta_{27} D_{27} + \\ & \beta_{28} D_{28} + \beta_{29} D_{29} + \beta_{30} D_{30} + \beta_{31} D_{31} + \beta_{32} D_{32} + \beta_{33} D_{33} + \beta_{34} D_{34} + \\ & \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.5) \end{aligned}$$

dimana:

LogPE_{it} = Logaritma Pertumbuhan Ekonomi

LogBM_{it-1} = Logaritma Realisasi Belanja Modal tahun sebelumnya

LogAK_{it} = Logaritma Jumlah Angkatan Kerja

LogPEN_{it}	= Logaritma Tingkat Pendidikan
LogDF_{it}	= Logaritma Indikator Desentralisasi Fiskal
D_1	= dummy Kabupaten Cilacap
D_2	= dummy Kabupaten Banyumas
D_3	= dummy Kabupaten Purbalingga
D_4	= dummy Kabupaten Banjarnegara
D_5	= dummy Kabupaten Kebumen
D_6	= dummy Kabupaten Purworejo
D_7	= dummy Kabupaten Wonosobo
D_8	= dummy Kabupaten Magelang
D_9	= dummy Kabupaten Boyolali
D_{10}	= dummy Kabupaten Klaten
D_{11}	= dummy Kabupaten Sukoharjo
D_{12}	= dummy Kabupaten Wonogiri
D_{13}	= dummy Kabupaten Karanganyar
D_{14}	= dummy Kabupaten Sragen
D_{15}	= dummy Kabupaten Grobogan
D_{16}	= dummy Kabupaten Blora
D_{17}	= dummy Kabupaten Rembang
D_{18}	= dummy Kabupaten Pati
D_{19}	= dummy Kabupaten Kudus
D_{20}	= dummy Kabupaten Jepara

D_{21}	= dummy Kabupaten Demak
D_{22}	= dummy Kabupaten Semarang
D_{23}	=: dummy Kabupaten Temanggung
D_{24}	= dummy Kabupaten Kendal
D_{25}	= dummy Kabupaten Batang
D_{26}	= dummy Kabupaten Pekalongan
D_{27}	= dummy Kabupaten Pemalang
D_{28}	= dummy Kabupaten Tegal
D_{29}	= dummy Kabupaten Brebes
D_{30}	= dummy Kota Magelang
D_{31}	= dummy Kota Surakarta
D_{32}	= dummy Kota Salatiga
D_{33}	= dummy Kota Pekalongan
D_{34}	= dummy Kota Tegal
α_0	= intersep
$\alpha_1 - \alpha_6$	= koefisien regresi variabel bebas
$\beta_1 - \beta_{34}$	= koefisien dummy wilayah
ε_{it}	= gangguan waktu t untuk unit cross section I
i	= 1, 2, 3, ..., 34 (data <i>cross section</i> kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)
t	= 1, 2, 3, ..., 34 (data <i>time series</i> , tahun 2004-2009)

3.4.3 Asumsi Model Regresi Linier Klasik

Sifat-sifat statistik yang membuat metode OLS menjadi populer hanya berlaku jika memenuhi asumsi-asumsi model regresi linier klasik. Asumsi tersebut adalah (Gujarati, 2003):

1. Model regresi linier dalam parameter.
2. Variabel independen adalah non stokastik (yaitu tetap dalam penyempelan berulang).
3. Nilai rata-rata bersyarat dari unsur gangguan populasi, u_i , tergantung pada nilai tertentu variabel independen adalah nol, atau $E(u_i|x_i) = 0$.
4. Varians bersyarat dari gangguan u_i adalah konstan dan sama untuk semua observasi (homoskedastik). $\text{Var}(u_i|x_i) = \sigma_i^2$.
5. Tidak ada autokorelasi dalam gangguan. $\text{Cov}(u_i, u_j) = 0$.
6. Jika X stokastik, X independen dari gangguan u_i atau $\text{Cov}(u_i, x_i) = 0$.
7. Jumlah observasi harus lebih besar dari jumlah variabel independen.
8. Adanya variabilitas yang cukup dalam nilai X , artinya nilai X harus berbeda tidak boleh sama semua
9. Model regresi telah dispesifikasi dengan benar
10. Tidak ada multikolinieritas diantara variabel independen.

3.4.3.1 Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Menurut Gujarati (2003), indikator-indikator untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model adalah sebagai berikut.

1. Nilai R^2 tinggi namun variabel independen banyak yang tidak signifikan.

Untuk memperoleh nilai R^2 , maka terlebih dahulu dilakukan estimasi terhadap model awal persamaan. Apabila nilai R^2 tinggi (misalnya lebih dari 0,8) dan variabel independen banyak yang tidak signifikan maka dalam model regresi tersebut terdapat multikolinearitas.

2. Melakukan regresi parsial.

Menggunakan regresi parsial pada masing-masing variabel independen, kemudian membandingkan nilai R^2 dalam model persamaan awal dengan R^2 pada model regresi parsial. Jika nilai R^2 dalam regresi parsial lebih tinggi maka terdapat multikolinearitas.

3.4.3.2 Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul di dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier, yakni bahwa variasi gangguan sama untuk semua pengamatan (homokedastisitas). Jika asumsi ini dilanggar, maka estimasi koefisien akan tidak bias tetapi variasi estimasi

koefisiennya tidak minimal lagi dengan kata lain estimasi koefisiennya tidak akurat lagi (Firmansyah, 2008).

Pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas tidak hanya dengan melihat pada *Sactter Plot* atau pada pola gangguan saja. Beberapa metode statistik yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak seperti Uji White, Uji Park, Uji Gletjer, dan lain-lain.

Untuk menguji ada tidaknya variasi gangguan yang berpola atau yang disebut dengan heteroskedastisitas, hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ho = Tidak ada Heteroskedastisitas

H1 = Ada Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi dengan menggunakan metode *White Heteroskedasticity test* yang telah disediakan dalam program *eviews*. Hasil yang diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan *Obs*R-Squared*. Jika nilai *Obs*R-Squared* lebih kecil χ^2 tabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Demikian pula sebaliknya (Shochrul dkk, 2011).

3.4.3.3 Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana gangguan pada periode/ observasi tertentu berkorelasi dengan gangguan pada periode/ observasi lain yang berurutan, dengan kata lain gangguan tidak random. Akibat dari adanya autokorelasi adalah

parameter yang diamati menjadi bias dan variannya tidak minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Salah satu cara untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model persamaan regresi adalah *Breusch & Godfrey Test* (BG Test) atau Uji *Lagrange-Multiplier* (LM). Pengujian dengan BG dilakukan dengan meregres gangguan u_t , menggunakan autoregressive model dengan orde p :

$$u_t = \rho_1 u_{t-1} + \rho_2 u_{t-2} + \dots + \rho_p u_{t-p} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.6)$$

dengan hipotesa nol, H_0 adalah : $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$, dimana koefisien autoregressive secara simultan sama dengan nol, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam setiap orde. Secara manual, jika χ^2 tabel lebih besar dari $Obs * R\text{-Squared}$ maka model tersebut bebas dari autokorelasi (Firmansyah, 2008).

3.4.3.4 Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah gangguan u_i , didistribusikan secara normal atau tidak. Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Jarque-Berra* (JB) dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung skewness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai χ^2 (Chi Square) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal.

$$J - B \text{ hitung} = \left[\frac{S^2}{6} + \left(\frac{k-3}{24} \right)^2 \right] \dots \dots \dots (3.7)$$

Dimana:

S = Skewness statistik

k = Kurtosis, menggambarkan banyaknya koefisien yang digunakan di dalam persamaan

Jika nilai J-B hitung $>$ J-B tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa gangguan ui terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya.

Deteksi normalitas dapat juga dilihat dari koefisien Jarque-Bera dan probabilitasnya. Kedua angka ini bersifat saling mendukung. Apabila probabilitas lebih besar dari 5%, maka data terdistribusi normal (hipotesisnya adalah data terdistribusi normal (Winarno, 2009).

3.4.4 Uji Statistik

3.4.4.1 Uji Individual (uji t)

Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual, digunakan tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis:

Hipotesis 1

$H_0 : \alpha_1 = 0$ Belanja Modal tahun sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

$H_1 : \alpha_1 > 0$ Belanja Modal tahun sebelumnya berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Hipotesis 2

$H_0 : \alpha_2 = 0$ Angkatan Kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

$H_1 : \alpha_2 > 0$ Angkatan Kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Hipotesis 3

$H_0 : \alpha_3 = 0$ Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

$H_1 : \alpha_3 > 0$ Pendidikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Hipotesis 4

$H_0 : \alpha_4 = 0$ Indikator Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

$H_1 : \alpha_4 > 0$ Indikator Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Hipotesis 5

$H_0 : \beta_1, \dots, \beta_{34} = 0$ Tidak terdapat perbedaan karakteristik tingkat pertumbuhan ekonomi antara Kota Semarang (*benchmark*) dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah

$H_1 : \beta_1, \dots, \beta_{34} \neq 0$ Terdapat perbedaan karakteristik tingkat pertumbuhan antara Kota Semarang (*benchmark*) dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah

Dengan ketentuan H_0 ditolak bila nilai probabilitas dari t-statistik lebih kecil dibandingkan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) dan H_0 diterima bila nilai probabilitas dari t-statistik lebih besar dibanding tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$).

3.4.4.2 Pengujian Secara Serentak (uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, menggunakan uji F dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta_1, \dots, \beta_6, \alpha_1, \dots, \alpha_{34} = 0$ semua variabel independen tidak dapat mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

$H_1: \beta_1, \dots, \beta_6, \alpha_1, \dots, \alpha_{34} \neq 0$ semua variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan F statistik dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai F statistik dengan tingkat kepercayaan 95 % atau membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. F hitung dapat dipenuhi dengan formula sebagai berikut:

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)} \dots\dots\dots(3.8)$$

Dimana:

R^2 : koefisien determinasi

K : jumlah variabel independen termasuk konstanta

N : jumlah sampel

Apabila nilai probabilitas F statistik < tingkat kepercayaan 95% maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika, F statistik > tingkat kepercayaan 95% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Selain dengan cara tersebut, pengujian hipotesis dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka H_0 ditolak dan sebaliknya.

3.4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan koefisien yang mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan dengan variasi dari variabel independen, dimana nilai R^2 mempunyai rentang nilai 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1, semakin baik. Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{(Y_i - \bar{Y})^2} \dots\dots\dots (3.9)$$

Kelemahan mendasar menggunakan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak penelitian menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model.